

Nomor Surat	SB-062/CSL-LN/BEI/VI/21
Nama Perusahaan	PT Link Net Tbk.
Kode Emiten	LINK
Lampiran	1
Perihal	Penyampaian Bukti Iklan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2020 PT Link Net Tbk

Dengan ini Perseroan / Emiten menyampaikan bukti iklan tentang Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2020 PT Link Net Tbk

yang telah diiklankan di media cetak :

Informasi	Nama Media Cetak	Tanggal Penerbitan
Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun	Investor Daily	10 Juni 2021

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Link Net Tbk.

Johannes

Corporate Secretary

PT Link Net Tbk.

BeritaSatu Plaza Lantai 4, Jl. Jend.Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta Selatan,

Telepon : 021-5278811, Fax : 021-5278833, www.linknet.co.id

Tanggal dan Waktu	10-06-2021 18:59
Lampiran	1. 20210610 ID Jadwal Dividen.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Link Net Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Link Net Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	SB-062/CSL-LN/BEI/VI/21
Issuer Name	PT Link Net Tbk.
Issuer Code	LINK
Attachment	1
Subject	Advertisement Submission of null

The Issuer has advertised null

on the following news media:

Information	Name of News Media	Publication Date
Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun	Investor Daily	10 June 2021

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Link Net Tbk.

Johannes

Corporate Secretary

PT Link Net Tbk.

BeritaSatu Plaza Lantai 4, Jl. Jend.Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta Selatan,

Phone : 021-5278811, Fax : 021-5278833, www.linknet.co.id

Date and Time	10-06-2021 18:59
Attachment	1. 20210610 ID Jadwal Dividen.pdf

This is an official document of PT Link Net Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Link Net Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.



Antara

Kendala Distribusi Kedelai Impor

Perajin tempe mengangkut kedelai impor di sebuah gudang di sentra pengrajin tahu tempe Sanan, Malang, Jawa Timur, Rabu (9/6/2021). Selain terkendala harga kedelai impor yang terus mengalami kenaikan, distributor kedelai setempat juga mengeluhkan kedatangan pasokan yang menjadi lebih lama karena harus menjalani pemeriksaan di sejumlah titik sejak masa pandemi Covid-19 sehingga membuat biaya angkut makin membengkak.

Kementan Fokus Sediakan Tujuh Komoditas Pangan

Oleh **Ridho Syukra**

► JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) tetap fokus pada pemenuhan pangan masyarakat pada tahun depan, yakni dengan mempertahankan tingkat produktivitas tujuh komoditas utama, seperti yang dilakukan pada 2020 dan 2021. Ketujuh komoditas itu adalah padi dengan target 55,20 juta ton, jagung 20,10 juta ton, kedelai 0,30 juta ton, bawang merah 1,64 juta ton, cabai 2,87 juta ton, gula 2,30 juta ton, dan daging sapi 0,44 juta ton. Untuk memenuhi target tersebut, Kementan memperoleh pagu indikatif sebesar Rp 14,51 triliun pada 2022.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, pada 2022, Kementan memiliki enam rancangan program utama. *Pertama*, menjaga keberlanjutan peningkatan produksi komoditas prioritas. *Kedua*, pengembangan diversifikasi pangan lokal. *Ketiga*, penguatan rantai pasok dan logistik pangan. *Keempat*, penguatan *food estate* dan korporasi petani. *Kelima*, pengembangan *smart farming* dan digitalisasi pertanian (*e-agriculture*). *Keenam*, peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor pertanian. "Pada 2022, kami akan tetap fokus untuk menyediakan pangan utama bagi 273 juta penduduk Indonesia," kata Mentan saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Rabu (9/6).

Mentan Syahrul mengatakan, anggaran pemerintah melalui APBN untuk pembangunan pertanian memang terbatas, untuk itu Kementan akan memanfaatkan skema pembiayaan lain yang memang memungkinkan untuk menjalankan program Kementan.

"Kami sadari APBN untuk pertanian terbatas, karena itu kami akan optimalkan skema kredit usaha rakyat (KUR) dan juga subsidi lainnya," ujar Mentan. Meski dalam rapat kerja tersebut belum disebutkan usulan tambahan pagu indikatif Kementan untuk 2022, Mentan meyakini sektor pertanian akan mendapatkan prioritas dari pemerintah untuk mendapat penambahan anggaran.

Mentan menjelaskan, dalam keterbatasan jumlah anggaran, kinerja sektor pertanian selama ini tetap baik karena anggaran dimanfaatkan secara optimal. Setidaknya hal itu tampak dari realisasi produksi komoditas utama pada 2020, produksi padi mencapai 54,65 juta ton atau naik 0,09% dari 2019, produksi jagung 23,09 juta ton atau 101% dari target, bawang merah 1,81 juta ton atau 113% dari target, cabai 2,77 juta ton atau 105% dari target, daging sapi/kerbau 0,54 juta ton atau 132% dari target. Program akselerasi ekspor yang dilaksanakan

selama tahun anggaran 2020 hingga sekarang juga berdampak positif terhadap peningkatan nilai ekspor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor pertanian Januari-Desember 2020 mencapai Rp 451,80 triliun atau naik 15,79% dari 2019 senilai Rp 390,20 triliun, sementara pada Januari-April 2021 ekspor pertanian mencapai Rp 189,09 triliun atau tumbuh 34,97% dari periode sama tahun sebelumnya dengan mayoritas berupa ekspor olahan pertanian. Meningkatnya kinerja produksi dan ekspor pangan membuat kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional pun turut meningkat, bahkan saat pandemi Covid-19. Masih merujuk data BPS, pada triwulan II-2020 produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian tumbuh 16,24% dari kuartal sebelumnya. Pada triwulan III-2020 dan triwulan IV-2020, PDB pertanian juga tumbuh masing-masing 2,15% dan 2,59% dari periode sama tahun sebelumnya. "Pertanian menjadi penyelamat perburukan resesi ekonomi nasional," tutur dia.

Sementara itu, penyerapan anggaran belanja Kementan untuk tahun ini per 6 Juni 2021 baru mencapai 20,93% dari total alokasi Rp 19,80 triliun atau terealisasi sekitar Rp 4,10 triliun. Sampai akhir Mei 2021, realisasi kegiatan utama yang telah melebihi 30% antara lain pengembangan padi 33%, pengembangan kawasan rempah 48%, kawasan karet 45%, kawasan kakao 34%, penyediaan benih ternak unggul 52%, penyediaan bibit ternak unggul 41%, pakan ternak 48%, dan optimasi reproduksi ternak 44%. "Pagu anggaran alokasi pertanian yang semula Rp 15,51 triliun menjadi Rp 19,80 triliun. Realisasi anggaran mencapai 28,87%," kata Mentan.

Kegiatan utama Kementan untuk mengantisipasi kekeringan juga dilakukan antara lain, *pertama*, melakukan inventarisasi daerah rawan kekeringan dan pengawalan serta monitoring penanaman pada daerah yang berpotensi kekeringan. "Ini ada gugus tugasnya," ujar Mentan. *Kedua*, meningkatkan koordinasi instansi terkait pusat dan daerah dalam rangka mitigasi dampak risiko kekeringan. *Ketiga*, pemanfaatan sumber-sumber air, seperti embung, bendungan, waduk, pompa, dan lain-lain, serta mitigasi kekeringan. *Keempat*, pemanfaatan asuransi usaha tani padi, bantuan saprodi, serta pemanfaatan lahan kering dan rawa. *Kelima*, diseminasi informasi prakiraan iklim dengan melakukan pemanfaatan aplikasi digital yang ada. (ti)

Selain meningkatkan kesadaran masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan pesisir dan terolahnya sampah di wilayah sekitar, program penyediaan tempat pembuangan sementara atau pusat daur ulang di WP3K juga membantu meningkatkan usaha perekonomian masyarakat. Bantuan ini

dan terdapat kemungkinan pula masuk dalam rantai makanan di ekosistem laut. "KKP melakukan langkah-langkah strategis dalam penanganan sampah. KKP akan melakukan beberapa kegiatan di WP3K, seperti penanganan pencemaran, pembangunan tempat penampungan sementara/pusat daur ulang, dan pengembangan kawasan pesisir bersih," ujar dia di Jakarta, Rabu (9/6). Selain meningkatkan kesadaran masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan pesisir dan terolahnya sampah di wilayah sekitar, program penyediaan tempat pembuangan sementara atau pusat daur ulang di WP3K juga membantu meningkatkan usaha perekonomian masyarakat. Bantuan ini



Syahrul Yasin Limpo

Kementan tetap fokus pada pemenuhan pangan masyarakat pada tahun depan, yakni dengan mempertahankan tingkat produktivitas tujuh komoditas utama, seperti yang dilakukan pada 2020 dan 2021.

Kementan memperoleh pagu indikatif sebesar Rp 14,51 triliun pada 2022.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, pada 2022, Kementan memiliki enam rancangan program utama. *Pertama*, menjaga keberlanjutan peningkatan produksi komoditas prioritas. *Kedua*, pengembangan diversifikasi pangan lokal. *Ketiga*, penguatan rantai pasok dan logistik pangan. *Keempat*, penguatan *food estate* dan korporasi petani. *Kelima*, pengembangan *smart farming* dan digitalisasi pertanian (*e-agriculture*). *Keenam*, peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor pertanian. "Pada 2022, kami akan tetap fokus untuk menyediakan pangan utama bagi 273 juta penduduk Indonesia," kata Mentan saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Rabu (9/6).

Mentan Syahrul mengatakan, anggaran pemerintah melalui APBN untuk pembangunan pertanian memang terbatas, untuk itu Kementan akan memanfaatkan skema pembiayaan lain yang memang memungkinkan untuk menjalankan program Kementan.

"Kami sadari APBN untuk pertanian terbatas, karena itu kami akan optimalkan skema kredit usaha rakyat (KUR) dan juga subsidi lainnya," ujar Mentan. Meski dalam rapat kerja tersebut belum disebutkan usulan tambahan pagu indikatif Kementan untuk 2022, Mentan meyakini sektor pertanian akan mendapatkan prioritas dari pemerintah untuk mendapat penambahan anggaran.

Mentan menjelaskan, dalam keterbatasan jumlah anggaran, kinerja sektor pertanian selama ini tetap baik karena anggaran dimanfaatkan secara optimal. Setidaknya hal itu tampak dari realisasi produksi komoditas utama pada 2020, produksi padi mencapai 54,65 juta ton atau naik 0,09% dari 2019, produksi jagung 23,09 juta ton atau 101% dari target, bawang merah 1,81 juta ton atau 113% dari target, cabai 2,77 juta ton atau 105% dari target, daging sapi/kerbau 0,54 juta ton atau 132% dari target. Program akselerasi ekspor yang dilaksanakan

selama tahun anggaran 2020 hingga sekarang juga berdampak positif terhadap peningkatan nilai ekspor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor pertanian Januari-Desember 2020 mencapai Rp 451,80 triliun atau naik 15,79% dari 2019 senilai Rp 390,20 triliun, sementara pada Januari-April 2021 ekspor pertanian mencapai Rp 189,09 triliun atau tumbuh 34,97% dari periode sama tahun sebelumnya dengan mayoritas berupa ekspor olahan pertanian. Meningkatnya kinerja produksi dan ekspor pangan membuat kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional pun turut meningkat, bahkan saat pandemi Covid-19. Masih merujuk data BPS, pada triwulan II-2020 produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian tumbuh 16,24% dari kuartal sebelumnya. Pada triwulan III-2020 dan triwulan IV-2020, PDB pertanian juga tumbuh masing-masing 2,15% dan 2,59% dari periode sama tahun sebelumnya. "Pertanian menjadi penyelamat perburukan resesi ekonomi nasional," tutur dia.

Sementara itu, penyerapan anggaran belanja Kementan untuk tahun ini per 6 Juni 2021 baru mencapai 20,93% dari total alokasi Rp 19,80 triliun atau terealisasi sekitar Rp 4,10 triliun. Sampai akhir Mei 2021, realisasi kegiatan utama yang telah melebihi 30% antara lain pengembangan padi 33%, pengembangan kawasan rempah 48%, kawasan karet 45%, kawasan kakao 34%, penyediaan benih ternak unggul 52%, penyediaan bibit ternak unggul 41%, pakan ternak 48%, dan optimasi reproduksi ternak 44%. "Pagu anggaran alokasi pertanian yang semula Rp 15,51 triliun menjadi Rp 19,80 triliun. Realisasi anggaran mencapai 28,87%," kata Mentan.

Kegiatan utama Kementan untuk mengantisipasi kekeringan juga dilakukan antara lain, *pertama*, melakukan inventarisasi daerah rawan kekeringan dan pengawalan serta monitoring penanaman pada daerah yang berpotensi kekeringan. "Ini ada gugus tugasnya," ujar Mentan. *Kedua*, meningkatkan koordinasi instansi terkait pusat dan daerah dalam rangka mitigasi dampak risiko kekeringan. *Ketiga*, pemanfaatan sumber-sumber air, seperti embung, bendungan, waduk, pompa, dan lain-lain, serta mitigasi kekeringan. *Keempat*, pemanfaatan asuransi usaha tani padi, bantuan saprodi, serta pemanfaatan lahan kering dan rawa. *Kelima*, diseminasi informasi prakiraan iklim dengan melakukan pemanfaatan aplikasi digital yang ada. (ti)

Kegiatan utama Kementan untuk mengantisipasi kekeringan juga dilakukan antara lain, *pertama*, melakukan inventarisasi daerah rawan kekeringan dan pengawalan serta monitoring penanaman pada daerah yang berpotensi kekeringan. "Ini ada gugus tugasnya," ujar Mentan. *Kedua*, meningkatkan koordinasi instansi terkait pusat dan daerah dalam rangka mitigasi dampak risiko kekeringan. *Ketiga*, pemanfaatan sumber-sumber air, seperti embung, bendungan, waduk, pompa, dan lain-lain, serta mitigasi kekeringan. *Keempat*, pemanfaatan asuransi usaha tani padi, bantuan saprodi, serta pemanfaatan lahan kering dan rawa. *Kelima*, diseminasi informasi prakiraan iklim dengan melakukan pemanfaatan aplikasi digital yang ada. (ti)

Kementan tetap fokus pada pemenuhan pangan masyarakat pada tahun depan, yakni dengan mempertahankan tingkat produktivitas tujuh komoditas utama, seperti yang dilakukan pada 2020 dan 2021.

Kementan memperoleh pagu indikatif sebesar Rp 14,51 triliun pada 2022.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, pada 2022, Kementan memiliki enam rancangan program utama. *Pertama*, menjaga keberlanjutan peningkatan produksi komoditas prioritas. *Kedua*, pengembangan diversifikasi pangan lokal. *Ketiga*, penguatan rantai pasok dan logistik pangan. *Keempat*, penguatan *food estate* dan korporasi petani. *Kelima*, pengembangan *smart farming* dan digitalisasi pertanian (*e-agriculture*). *Keenam*, peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor pertanian. "Pada 2022, kami akan tetap fokus untuk menyediakan pangan utama bagi 273 juta penduduk Indonesia," kata Mentan saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Rabu (9/6).

Mentan Syahrul mengatakan, anggaran pemerintah melalui APBN untuk pembangunan pertanian memang terbatas, untuk itu Kementan akan memanfaatkan skema pembiayaan lain yang memang memungkinkan untuk menjalankan program Kementan.

"Kami sadari APBN untuk pertanian terbatas, karena itu kami akan optimalkan skema kredit usaha rakyat (KUR) dan juga subsidi lainnya," ujar Mentan. Meski dalam rapat kerja tersebut belum disebutkan usulan tambahan pagu indikatif Kementan untuk 2022, Mentan meyakini sektor pertanian akan mendapatkan prioritas dari pemerintah untuk mendapat penambahan anggaran.

Mentan menjelaskan, dalam keterbatasan jumlah anggaran, kinerja sektor pertanian selama ini tetap baik karena anggaran dimanfaatkan secara optimal. Setidaknya hal itu tampak dari realisasi produksi komoditas utama pada 2020, produksi padi mencapai 54,65 juta ton atau naik 0,09% dari 2019, produksi jagung 23,09 juta ton atau 101% dari target, bawang merah 1,81 juta ton atau 113% dari target, cabai 2,77 juta ton atau 105% dari target, daging sapi/kerbau 0,54 juta ton atau 132% dari target. Program akselerasi ekspor yang dilaksanakan

selama tahun anggaran 2020 hingga sekarang juga berdampak positif terhadap peningkatan nilai ekspor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor pertanian Januari-Desember 2020 mencapai Rp 451,80 triliun atau naik 15,79% dari 2019 senilai Rp 390,20 triliun, sementara pada Januari-April 2021 ekspor pertanian mencapai Rp 189,09 triliun atau tumbuh 34,97% dari periode sama tahun sebelumnya dengan mayoritas berupa ekspor olahan pertanian. Meningkatnya kinerja produksi dan ekspor pangan membuat kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional pun turut meningkat, bahkan saat pandemi Covid-19. Masih merujuk data BPS, pada triwulan II-2020 produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian tumbuh 16,24% dari kuartal sebelumnya. Pada triwulan III-2020 dan triwulan IV-2020, PDB pertanian juga tumbuh masing-masing 2,15% dan 2,59% dari periode sama tahun sebelumnya. "Pertanian menjadi penyelamat perburukan resesi ekonomi nasional," tutur dia.

Sementara itu, penyerapan anggaran belanja Kementan untuk tahun ini per 6 Juni 2021 baru mencapai 20,93% dari total alokasi Rp 19,80 triliun atau terealisasi sekitar Rp 4,10 triliun. Sampai akhir Mei 2021, realisasi kegiatan utama yang telah melebihi 30% antara lain pengembangan padi 33%, pengembangan kawasan rempah 48%, kawasan karet 45%, kawasan kakao 34%, penyediaan benih ternak unggul 52%, penyediaan bibit ternak unggul 41%, pakan ternak 48%, dan optimasi reproduksi ternak 44%. "Pagu anggaran alokasi pertanian yang semula Rp 15,51 triliun menjadi Rp 19,80 triliun. Realisasi anggaran mencapai 28,87%," kata Mentan.

Kegiatan utama Kementan untuk mengantisipasi kekeringan juga dilakukan antara lain, *pertama*, melakukan inventarisasi daerah rawan kekeringan dan pengawalan serta monitoring penanaman pada daerah yang berpotensi kekeringan. "Ini ada gugus tugasnya," ujar Mentan. *Kedua*, meningkatkan koordinasi instansi terkait pusat dan daerah dalam rangka mitigasi dampak risiko kekeringan. *Ketiga*, pemanfaatan sumber-sumber air, seperti embung, bendungan, waduk, pompa, dan lain-lain, serta mitigasi kekeringan. *Keempat*, pemanfaatan asuransi usaha tani padi, bantuan saprodi, serta pemanfaatan lahan kering dan rawa. *Kelima*, diseminasi informasi prakiraan iklim dengan melakukan pemanfaatan aplikasi digital yang ada. (ti)

RNI Jamin Harga Minimal Gula Petani Rp 10.500/Kg

JAKARTA—PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI Persero) sebagai calon perusahaan induk (*holding*) BUMN pangan menjamin harga minimal pembelian (*offtake*) gula dari petani tebu sebesar Rp 10.500 per kilogram (kg). Hal tersebut dilakukan untuk melindungi petani dari kejatuhan harga.

Direktur Utama RNI Arief Prasetyo Adi menjelaskan, hal ini sesuai arahan Menteri Perdagangan M Lutfi dan telah dikordinasikan dengan Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTRI) serta asosiasi lainnya seperti Asosiasi Gula Indonesia (AGI) dan Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI), serta BUMN PTPN III Holding (PTPN Group). "Ini sesuai arahan Mendag untuk mengamankan harga penjualan gula petani sekaligus mengoptimalkan *offtake* gula petani," ujar Arief.

Mengenai harga minimal pembelian gula, lanjut Arief, RNI telah memberikan jaminan secara tertulis kepada asosiasi, salah satunya APTRI, serta menyosialisasikan kepada pabrik-pabrik gula yang dikelolanya untuk memperkuat kemitraan dengan para mitra petani tebu rakyat dengan mengawal pelaksanaan lelang gula yang dilakukan petani serta menjaga harga penjualan gula setiap periode/per minggu di sejumlah wilayah



Arief Prasetyo Adi

operasional RNI. "Kami telah sosialisasikan ke para mitra petani tebu untuk menjamin harga lelang minimal *offtake* di angka Rp 10.500 per kg," kata dia, Rabu (9/6).

Dia menambahkan jika pada proses penjualan produksi gula petani tebu rakyat terdapat harga lelang yang lebih tinggi dari harga jaminan, RNI akan membeli sesuai harga pasar/lelang gula, dan sebaliknya. "Jika terdapat harga lelang gula di bawah harga jaminan Rp 10.500 per kg, RNI akan membeli sesuai harga yang dijamin," ujar dia. Dalam memonitor penjualan harga lelang gula petani dan melakukan pembelian, RNI siap bersinergi dengan PTPN Group dan beberapa asosiasi dalam pelaksanaannya dengan harapan dapat memperkuat pembenahan industri gula nasional. "Menteri Perdagangan dan Menteri BUMN sangat mengapresiasi apa yang dilakukan RNI dan

PTPN Group untuk inklusivitas dan menjaga harga di tingkat petani," kata Arief seperti dilansir Antara.

RNI telah menyerap tebu petani rakyat untuk digiling sekitar 3,30 juta ton bahan baku tebu pada 2020 dengan jumlah petani tebu rakyat yang menjadi mitra RNI Group sekitar 4.000 petani. "Minat petani untuk menanam tebu terbilang masih tinggi dan cenderung meningkat, karenanya kontribusi kami untuk pembenahan industri gula adalah dengan meningkatkan serapan tebu petani rakyat," ujar Arief. RNI memiliki sejumlah strategi untuk penguatan lini bisnis gula, di antaranya melalui kerja sama dengan mitra strategis untuk peningkatan kapasitas dan revitalisasi pabrik gula, perluasan areal perkebunan tebu, penerapan *smart farming*, dan penguatan pola kemitraan dengan petani, penguatan riset varietas tebu melalui pengembangan riset internal dan kerja sama dengan lembaga riset atau perguruan tinggi.

Pada 2021, RNI menargetkan produksi gula 282 ribu ton yang berasal dari tebu petani rakyat maupun milik sendiri dengan kisaran rendemen di angka 8,10%. Produksi tersebut mengalami peningkatan hingga 22% dari target sebelumnya pada 2020 sebanyak 231 ribu ton. (ti)

Miwon Serap Jagung Rendah Aflatoksin Lokal

JAKARTA—PT Miwon, salah satu industri *corn starch* (pati jagung) terbesar kedua di Indonesia, komit menggunakan jagung rendah aflatoksin (JRA) domestik. Hal itu dilakukan Miwon untuk menindaklanjuti nota kesepahaman antara Perkumpulan Produsen Pemurni Jagung Indonesia (P3JI) dengan Dijen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) terkait kemitraan produksi dan pemasaran JRA dengan menggandeng PT DNA di Lombok Timur untuk memulai secara bertahap menggunakan JRA dalam negeri.

Launching pengiriman perdana JRA sebanyak 100 ton dari Lombok Timur ke PT Miwon di Gresik dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur, Minggu (30/5). Kepala Dinas Pertanian Lombok Timur HM Abadi menginformasikan, luas tanam jagung dalam satu tahun di Lombok Timur tahun ini diperkirakan sekitar 33 ribu hektare (ha) dengan 40% di antaranya berupa lahan kering yakni lahan kering dengan sumbu bor 40% dan sisanya lahan irigasi. "Sebagian besar petani sudah mendapatkan sosialisasi bagaimana menghasilkan jagung berkualitas sehingga sangat memungkinkan untuk dilakukan kerja sama dengan industri pengguna jagung rendah aflatoksin," ujar dia dalam keterangan Kementan, kemarin.

Produksi JRA PT DNA dilakukan melalui pola kemitraan dengan petani jagung di wilayah Lombok Timur. "Petani mitra harus mengikuti Standar Prosedur Operasional (SOP) budidaya jagung yang sudah ditetapkan termasuk kapan harus menanam jagung," ujar Direktur Utama PT DNA Dean Novel. Tim Agronomis PT DNA bekerja sama dengan penyuluh dari Dinas Pertanian

setempat bertugas memastikan bahwa petani mitra mengikuti SOP yang sudah disepakati. Melalui pola kemitraan yang dijalankan, Dean memastikan petani mitra mendapatkan sumber pembiayaan input produksi yang digunakan dan bisa berkonsentrasi menjalankan SOP produksi jagung yang baik dan benar (*Good Agriculture Practices/GAP*).

Data luasan petani mitra, jadwal tanam dan panen juga terverifikasi dengan baik melalui aplikasi digital dengan nama SJI yang digunakan PT DNA. Dean Novel mengatakan, proses penerangan jagung pipil panen hingga kadar air 14% membutuhkan waktu sekitar 10 jam. PT DNA memiliki *dryer* dengan kapasitas 60 ton per proses sehingga dalam sehari semalam PT DNA mampu menghasilkan JRA 120 ton (dua kali proses). Mengikuti jejak anggota P3JI lainnya, Miwon menerjunkan tim teknis untuk melihat langsung penanaman jagung di Kabupaten Lombok Timur dan kabupaten lainnya di Pulau Lombok.

Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi menyatakan, kunci produksi jagung JRA adalah proses panen dan pascapanennya. Suwandi meminta petani

menjalankan prosedur yang harus dijalankan sehingga hasil panen bisa optimal. Terkait dukungan alat Kementan, Suwandi menambahkan, telah memberikan bantuan alat panen *corn combine harvester* dan mesin penerger jagung vertikal (*dryer*). "Saya harap dengan bantuan ini petani bisa bersemangat dan bisa meluaskan lagi usahanya, untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan nilai tambah bagi petani selama pandemi seperti sekarang," ujar dia.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Gatut Submogodjati mengapresiasi Miwon yang telah membuktikan komitmennya menyerap JRA dari dalam negeri. "Untuk memudahkan pengawalan Nota Kesepahaman, memang harus ada volume tertentu yang disepakati dengan calon *supplier* JRA," kata Gatut. Di bawah komando Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Kementan terus melakukan sosialisasi untuk menambah unit usaha yang melakukan penanganan pascapanen terentralisasi dan bermitra dengan petani serta penyedia input produksi pertanian untuk memproduksi JRA, baik kepada poktan/gapoktan jagung maupun kepada calon-calon investor baru. (ti)

KKP Siapkan Pusat Daur Ulang Sampah di Laut

JAKARTA—Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Ditjen Pengelolaan Ruang Laut menyiapkan pusat daur ulang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K) untuk menangani permasalahan sampah di laut. Langkah itu masuk dalam program kegiatan bantuan sarana dan prasarana penanggulangan pencemaran di WP3K.

Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP TB Haeru Rahayu mengatakan, masalah sampah di Indonesia menjadi perhatian besar pemerintah karena sampah yang masuk ke laut 80% berasal dari daratan. Kondisi itu memungkinkan dalam proses pelacakan sampah plastik untuk menjadi nonplastik membutuhkan proses yang panjang

dan terdapat kemungkinan pula masuk dalam rantai makanan di ekosistem laut. "KKP melakukan langkah-langkah strategis dalam penanganan sampah. KKP akan melakukan beberapa kegiatan di WP3K, seperti penanganan pencemaran, pembangunan tempat penampungan sementara/pusat daur ulang, dan pengembangan kawasan pesisir bersih," ujar dia di Jakarta, Rabu (9/6).

Selain meningkatkan kesadaran masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan pesisir dan terolahnya sampah di wilayah sekitar, program penyediaan tempat pembuangan sementara atau pusat daur ulang di WP3K juga membantu meningkatkan usaha perekonomian masyarakat. Bantuan ini

nantinya berupa sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan pemisahan, pencucian, pengemasan, dan pengiriman produk daur ulang sampah. Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil KKP Muhammad Yusuf mengatakan, jenis bantuan tempat penampungan sementara/pusat daur ulang yang akan dibangun di beberapa lokasi percontohan di Indonesia berbentuk bangunan sederhana semi permanen dengan fasilitas alat pengolah sampah seperti mesin pencacah plastik, mesin *press*, dan mesin komposter.

Keberadaan pusat daur ulang di pesisir bisa menjadi solusi sehingga sampah yang dihasilkan dari kegiatan masyarakat dapat langsung dibuang atau

didaur ulang, bantuan prasarana ini menasar kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat yang melakukan kegiatan pada bidang kelautan dan perikanan.

Saat ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi sampah plastik hingga 30% dan penanganan pengelolaan sampah plastik sebesar 70% dan mengurangi sampah berbentuk bangunan sederhana semi permanen dengan fasilitas alat pengolah sampah seperti mesin pencacah plastik, mesin *press*, dan mesin komposter.

Keberadaan pusat daur ulang di pesisir bisa menjadi solusi sehingga sampah yang dihasilkan dari kegiatan masyarakat dapat langsung dibuang atau

didaur ulang, bantuan prasarana ini menasar kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat yang melakukan kegiatan pada bidang kelautan dan perikanan. Saat ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi sampah plastik hingga 30% dan penanganan pengelolaan sampah plastik sebesar 70% dan mengurangi sampah berbentuk bangunan sederhana semi permanen dengan fasilitas alat pengolah sampah seperti mesin pencacah plastik, mesin *press*, dan mesin komposter. Keberadaan pusat daur ulang di pesisir bisa menjadi solusi sehingga sampah yang dihasilkan dari kegiatan masyarakat dapat langsung dibuang atau

didaur ulang, bantuan prasarana ini menasar kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat yang melakukan kegiatan pada bidang kelautan dan perikanan. Saat ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi sampah plastik hingga 30% dan penanganan pengelolaan sampah plastik sebesar 70% dan mengurangi sampah berbentuk bangunan sederhana semi permanen dengan fasilitas alat pengolah sampah seperti mesin pencacah plastik, mesin *press*, dan mesin komposter. Keberadaan pusat daur ulang di pesisir bisa menjadi solusi sehingga sampah yang dihasilkan dari kegiatan masyarakat dapat langsung dibuang atau

didaur ulang, bantuan prasarana ini menasar kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat yang melakukan kegiatan pada bidang kelautan dan perikanan. Saat ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi sampah plastik hingga 30% dan penanganan pengelolaan sampah plastik sebesar 70% dan mengurangi sampah berbentuk bangunan sederhana semi permanen dengan fasilitas alat pengolah sampah seperti mesin pencacah plastik, mesin *press*, dan mesin komposter. Keberadaan pusat daur ulang di pesisir bisa menjadi solusi sehingga sampah yang dihasilkan dari kegiatan masyarakat dapat langsung dibuang atau

Saat ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi sampah plastik hingga 30% dan penanganan pengelolaan sampah plastik sebesar 70% dan mengurangi sampah berbentuk bangunan sederhana semi permanen dengan fasilitas alat pengolah sampah seperti mesin pencacah plastik, mesin *press*, dan mesin komposter.

Keberadaan pusat daur ulang di pesisir bisa menjadi solusi sehingga sampah yang dihasilkan dari kegiatan masyarakat dapat langsung dibuang atau

didaur ulang, bantuan prasarana ini menasar kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat yang melakukan kegiatan pada bidang kelautan dan perikanan. Saat ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi sampah plastik hingga 30% dan penanganan pengelolaan sampah plastik sebesar 70% dan mengurangi sampah berbentuk bangunan sederhana semi permanen dengan fasilitas alat pengolah sampah seperti mesin pencacah plastik, mesin *press*, dan mesin komposter. Keberadaan pusat daur ulang di pesisir bisa menjadi solusi sehingga sampah yang dihasilkan dari kegiatan masyarakat dapat langsung dibuang atau

didaur ulang, bantuan prasarana ini menasar kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat yang melakukan kegiatan pada bidang kelautan dan perikanan. Saat ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi sampah plastik hingga 30% dan penanganan pengelolaan sampah plastik sebesar 70% dan mengurangi sampah berbentuk bangunan sederhana semi permanen dengan fasilitas alat pengolah sampah seperti mesin pencacah plastik, mesin *press*, dan mesin komposter. Keberadaan pusat daur ulang di pesisir bisa menjadi solusi sehingga sampah yang dihasilkan dari kegiatan masyarakat dapat langsung dibuang atau

Linknet

PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM RALAT JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TAHUNAN BUKU 2020 PT LINK NET TBK ("Perseroan")

Menunjuk pada Pemberitahuan Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tahunan Buku 2020 yang telah dimuat dalam surat kabar harian Investor Daily pada hari Rabu, 9 Juni 2021, dengan ini Direksi Perseroan bermaksud menyampaikan Ralat Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tahunan Buku 2020 menjadi sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (Cum Dividen) * Pasar Reguler dan Negosiasi * Pasar Tunai	15 Juni 2021 17 Juni 2021
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) * Pasar Reguler dan Negosiasi * Pasar Tunai	16 Juni 2021 18 Juni 2021
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (Recording Date)	17 Juni 2021
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tahunan Buku 2020	28 Juni 2021

- Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *Recording Date* pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening ekuitas di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 17 Juni 2021.
- Bagi pemegang saham yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 28 Juni 2021. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang namanya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/PT Sharestar Indonesia ("BAE") dengan alamat Berliana Satu Plaza Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kavling 35-36, Jakarta 12560 paling lambat tanggal 17 Juni 2021 atau pukul 16.15 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 17 Juni 2021, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 10 Juni 2021
PT Link Net Tbk
Direksi

YKAN Ajak Pelaku Bisnis Dukong Pelestarian Alam

JAKARTA—Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) mengajak para pelaku bisnis terutama yang berbasis alam, seperti konsesi kayu, perkebunan kelapa sawit, hingga perkebunan pulp dan kertas, untuk peduli terhadap kelestarian alam dalam menjalankan aktivitasnya. Mereka diharapkan menerapkan sistem pengelolaan bisnis yang berhubungan dengan alam tersebut secara berkelanjutan dan jangka panjang, sehingga mereka bisa turut mengelola sumber daya alam.

Herlina Hartanto, Executive

Director YKAN, mencemaskan beberapa kerusakan alam yang disebabkan beberapa aktivitas bisnis yang ada di sekitarnya, misalnya hilangnya mangrove yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Padahal, hutan mangrove berfungsi sebagai sistem pertahanan atau pembatas fisik alami yang melindungi daratan dan penduduk pesisir dari berbagai bahaya dari laut, seperti gelombang pasang, badai, angin topan, bahkan tsunami. "Karena itu, dengan menjaga atau memperbaiki keberadaan dan kondisi mangrove atau ekosistem

alam lainnya, kita dapat mencegah atau setidaknya mengurangi dampak bencana alam," kata Herlina di Jakarta, belum lama ini. Salah satu peran YKAN untuk membantu para pelaku bisnis berbasis alam ini bisa dilihat di daratan Kalimantan. Konsesi penebangan yang terjadi di Kalimantan dilakukan secara berkelanjutan. Perusahaan harus melakukan praktik penebangan dengan dampak yang rendah terhadap hutan. Dengan begitu, sangat memungkinkan hutan yang ditebang untuk tumbuh kembali. Hal ini pun dapat mempertahankan

kelestarian hutan yang dilakukan, bisa meminimalkan risiko pohon kelapa sawit turut dimakan oleh orangutan.

YKAN juga turut mendukung perlindungan dan pengelolaan hutan tropis dataran tinggi yang berkelanjutan. Hal ini karena hutan tropis juga menyimpan karbon dalam jumlah besar se-

hingga harus dihindari dari deforestasi dan degradasi. YKAN selalu mempromosikan praktik pengelolaan berkelanjutan untuk menjaga agar hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu tetap ada sebagai hutan yang sehat, sehingga tidak hanya menghasilkan kayu namun juga berguna sebagai daerah aliran sungai, dan bermanfaat secara sosial, budaya, dan iklim. YKAN pun mengajak masyarakat untuk berperan dalam perlindungan sumber daya alam melalui pendekatan SIGAP (Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan). (ti)